

**SKRIPSI**

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN UPAH  
MINIMUM KABUPATEN TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

*”Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau”*



**Disusun Oleh:**

**MUTIA DWI ANDRIANI**  
**155111192**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN**

**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**PEKANBARU**

**2019**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jl. Khairuddin Nasution No. 113 Marpoyan Damai

Telp : (0761) 674681 Fax : (0761) 674834 PEKANBARU - 28284

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : MUTIA DWI ANDRIANI  
NPM : 155111192  
Fakultas : EKONOMI  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN S1  
PEMBIMBING I : Drs.M.Nur,MM  
PEMBIMBING II : SINTA YULYANTI SE, M.Ec  
Judul Skripsi :PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN  
UPAH MINIMUM KABUPATEN TERHADAP TINGKAT  
PENGANGGURAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

MENYETUJUI :

**PEMBIMBING I**

(Drs.M.Nur,MM)

**PEMBIMBING II**

(SINTA YULYANTI SE,M.Dev)

MENGETAHUI :

**DEKAN**

(Drs. H. ABRAR, M.Si., Ak., CA)

**KETUA JURUSAN**

(Dra. Hj. ELLYAN SASTRANINGSIH, M.Si)

## ABSTRAK

### PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN UPAH MINIMUM KABUPATEN TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

MUTIA DWI ANDRIANI

155111192

( Dosen Pembimbing ) : Pembimbing I. Drs.M.Nur,MM  
Pembimbing II Sinta Yulyanti, Se., M.Dev

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) dan upah minimum kabupaten (UMK) terhadap tingkat pengangguran di kabupaten kepulauan meranti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis data dalam pengolahan hasil penelitian ini ialah metode analisis regresi linier berganda dimana metode tersebut digunakan untuk mengukur pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai  $R^2$  sebesar 0,601002. Hal tersebut berarti bahwa sebesar 60% variabel bebas (Tingkat Pengangguran) sudah mewakili untuk menjelaskan variable tidak bebas (produk domestik regional bruto dan upah minimum kabupaten). Sedangkan sisa nya sebesar 40% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Selanjutnya dilihat dari nilai koefisien variabel bebas dan uji T (Parsial) dapat diketahui bahwa produk domestik regional bruto ( $X_1$ ) mempunyai pengaruh positif dan signifikan sedangkan upah minimum kabupaten ( $X_2$ ) mempunyai pengaruh negative namun signifikan terhadap Tingkat Pengangguran (Y) di Kabupaten Kepulauan Meranti.*

**Kata Kunci:**Tingkat Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto dan Upah Minimum Kabupaten

## ABSTRACT

### THE INFLUENCE OF GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT AND DISTRICT MINIMUM WAGES ON THE UNEMPLOYMENT RATE IN MERANTI ISLAND REGENCY

(Supervisor): Supervisor I. Drs.M.Nur, MM  
Advisor II. Sinta Yulyanti,Se., M.Dev

*This study aims to determine how the influence of gross regional domestic product (GRDP) and district minimum wage (MSE) on the unemployment rate in Meranti islasnds. The data used in this research is secondary data. Data analysis method in managing the results of this study is the method of multiple linear regression analysis where the method is used to measure the effect of the dependent variable on the independent variable. The results showed that the R<sup>2</sup> value of 0.601002. This means that 60% of the independent variable (Unemployment Rate) has been represented to explain the dependent variable (gross regional domestic product and district minimum wage). While the remaining 40% is explained by other variables outside the model. Furthermore, seen from the coefficient value of the independent variable and the T test (partial) it can be seen that the gross regional domestic product (X1) has a positive and significant effect while the district minimum wage (X2) has a negative but significant effect on the Unemployment Rate (Y) in the Kepulauan Meranti District .*

**eywords: Unemployment Rate, Gross Regional Domestic Productt And  
District Minimum Wage**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karangan ilmiah yang berupa skripsi ini. Sholawat beserta salam penulis kirimkan untuk Rasulullah, Muhamma SAW. Alhamdulillah Allah SWT telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan Judul **“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Upah Minimum Kabupaten Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Kepulauan Meranti”**

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan serta kejanggalan-kejanggalan baik dalam bentuk susunan, tata cara bahasa, maupun yang memiliki untuk dapat menyelesaikannya dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dan saran-saran yang sedemikian rupa. Maka dari itu penulis menerima kritik dan saran yang sehat guna lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Tidak sedikit halangan rintangan yang penulis hadapi selama penulisan skripsi ini, maka penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan yang diberikan semua pihak, sehingga dari itu dalam kesempatan ini izinkan penulis megucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama sekali adalah buat orang tuaku tercinta yang telah memberikan banyak dukungan, dorongan, semangat serta selalu sabar

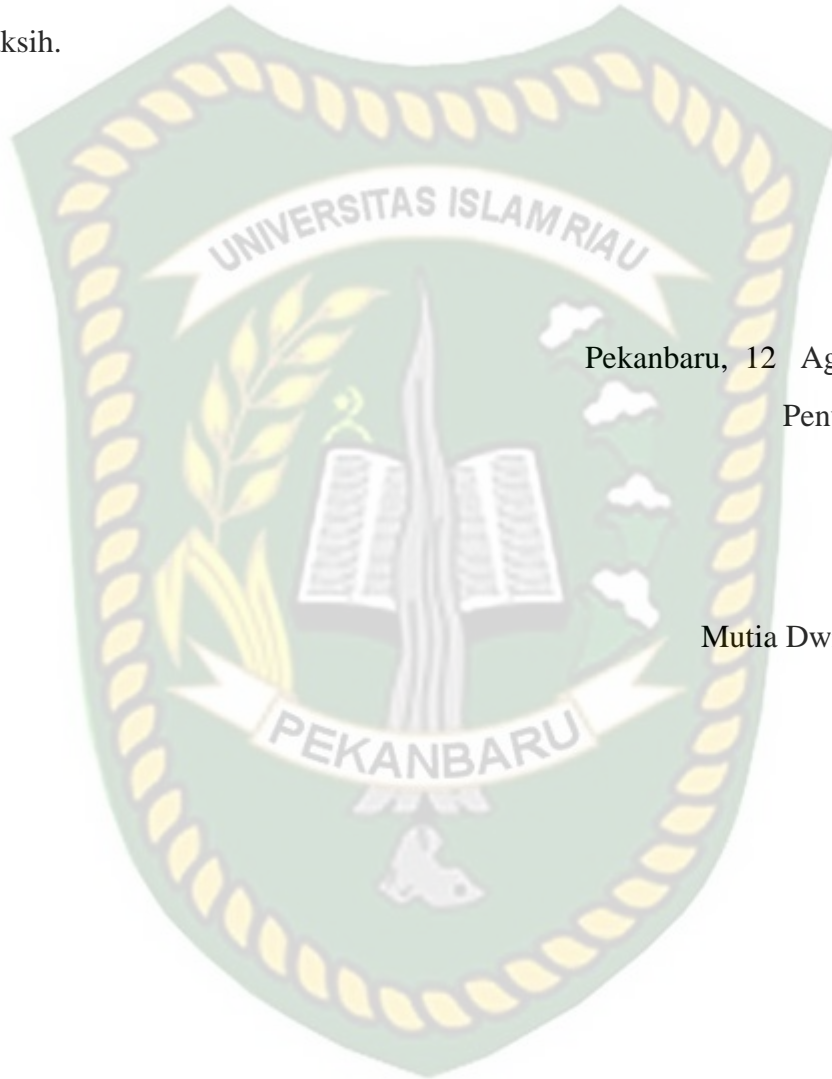
mendampingi penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berjasa kepada penulis yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, khususnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H. Syafrinaldi, SH., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Abrar, M.Si, Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang menciptakan semangat terutama pada mahasiswa tahap akhir.
3. Ibu Dra Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Riau.
4. Bapak Drs.M.Nur,MM. selaku pembimbing I yang telah membimbing sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
5. Ibu Sinta Yulyanti, SE., M.Dev pembimbing II yang telah membimbing saya sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini
6. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah membantu memberikan pelajaran berharga terhadap penulisan selama menimba ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
7. Para Karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah membantu khususnya dalam administrasi yang diperlukan dari awal hingga akhir penelitian ini.

8. Khususnya penulis ucapkan terimakasih pada kedua orang tua, Kasim (Bapak) Anida (Ibu), dan saudara kandung tersayang (Devi Eka Sari dan Rachman Subhan Trio). Serta para sepupu sepupu cantik dan ganteng, Kak Ratna Juwita, Merlin Nadia, Silvia Juwita, Sindi Marsela, Rendi Ade Candra, Bg Ade Saputra, Angga Kurniawan, M.Sofyan dan Dani yang selalu mendo'akan, mendukung, memotivasi dan memberikan pengorbanan kasih sayang yang tulus dan banyak hal yang tidak terhingga.
9. Terima kasih kepada para Sahabat dari awal kuliah yang setia menemani dan setia untuk membantu hingga saat ini Ayu Tuttuman Lestari,SE, Fitri Yeni,SE Fitri Mardian Ningsih,SE, Putri Rahmadani, SE, Hermanto,SE, Willy Dio Prakoso, SE, dan Khairul Fikriadi,SE, Ilham Putra Pratama yang memberikan dukungan dan do'a dalam penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada teman-teman angkatan 2015 Jurusan Ekonomi Pembangunan atas bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Terima kasih juga buat teman-teman kost Putri Ami, Umi Kalsum, Wetty, Kak Rani, Adek Novita, Fitriana, Anggun dan Saimada yang telah memberikan support dan do'a nya sehingga menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada semua teman-teman khususnya HIMEP FE UIR yang telah berikan dukungan dan do'a nya untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Dan kepada semua pihak dan teman-teman yang belum tersebutkan namanya satu persatu, atas dukungan dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ni, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangannya kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini. Atas bantuan yang diberilam pada semua pihak penulis ucapkan terimakasih.



Pekanbaru, 12 Agustus 2019

Penulis

Mutia Dwi Andriani



## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
<b>Bab I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
<b>Bab II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS</b>	
2.1 Tinjauan Pustaka.....	11
2.2 Penelitian Terdahulu.....	30
2.3 Kerangka Pikir.....	35
2.4 Hipotesis.....	35
<b>Bab III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Lokasi/ Objek Penelitian .....	36
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	36
3.3 Teknik dan Pengumpulan Data.....	37

3.5 Teknik Analisis Data .....	37
--------------------------------	----

## Bab VI GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Letak dan Keadaan Geografis.....	42
4.2 Kependudukan di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	46
4.3 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti .....	47
4.4 Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti .....	48

## BAB V HASIL PENELITIAN

5.1 Tingkat Pengangguran di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	50
5.2 Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Kepulauan Meranti .....	52
5.3 Upah Minimum Kabupaten di Kabupaten Kepulauan Meranti .....	54
5.4 Interpretasi Hasil.....	55
5.5 Pembahasan.....	62

## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan .....	65
6.2 Saran .....	65

DAFTAR PUSTAKA .....	67
----------------------	----

## LAMPIRAN DATA

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2010-2017 (%) .....	4
1.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2010-2017 .....	6
4.1 Luas daerah menurut kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2017.....	43
4.2 Tabel Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017.....	46
4.3 Data Jumlah Kecamatan, Ibu Kota, Desa/ Kelurahan di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017.....	47
5.1 Tingkat Pengangguran Terbuka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2010-2017 .....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	
Halaman	
Gambar Statistik Durbin-Watson.....	60



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia sejak krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 membuat kondisi ketenagakerjaan Indonesia ikut memburuk. Sejak itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah mencapai 7-8 persen. Padahal, masalah pengangguraneratkaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 3-4 persen, tentunya hanya menyerap 1,6 juta tenaga kerja, sementara pencari kerja mencapai rata-rata 2,5 pertahun.nsehingga, setiap tahun pasti ada sisa pencari kerja yang tidak memperoleh pekerjaan dan menimbulkan jumlah pengangguran di Indonesia bertambah (Todaro, 1998).

Masalah pengangguran merupakan masalah yang sangat berhubungan dengan siklus ekonomi. Tingginya pertumbuhan ekonomi jika diikuti oleh melonjaknya jumlah pertumbuhan penduduk yang tinggi pula tentu tidak akan mengurangi pengangguran. Masalah pengangguran adalah masalah sosial yang merupakan mata rantai dari kehidupan sehari-hari dan kehidupan negara serta banyak aspek yaitu politik dan kebahaagiaan individu secara umum. Krisis yang pernah dialami oleh negara Indonesia dan banyak negara lainnya di dunia banyak mempengaruhi hampir semua sektor kehidupan, mengharuskan setiap individu untuk berpikir keras untuk mmengambil kebijakan demi memenuhi mengingat keterbatasan sumber daya.

Besarnya angka pengangguran dapat dikatakan sangat penting. Hal ini dikarenakan pengangguran merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan akibat dari pembangunan ekonomi. Jumlah penduduk yang semakin meningkat diikuti pula dengan pertumbuhan penduduk (PDRB), dan upah minimum kabupaten.

Pengangguran dan Pertumbuhan penduduk yang tinggi, menimbulkan kesulitan kepada negara-negara berkembang untuk mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat. Perkembangan penduduk yang semakin cepat dan dalam jumlah yang besar sekali dapat menimbulkan beberapa masalah baru dan salah satu masalah tersebut adalah masalah pengangguran. Sedangkan kan penambahan penduduk yang semakin pesat dan semakin besar jumlahnya menyebabkan masalah pengangguran menjadi bertambah buruk (Sukirno, 2002).

Istilah pengangguran menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah seseorang yang termasuk kedalam kelompok penduduk usia kerja selama periode tertentu tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan bahkan adapula yang sedang menerima pekerjaan. pengangguran merupakan masalah yang sangat sulit dipecahkan untuk saat ini.

Masalah pengangguran merupakan masalah yang sering dihadapi oleh semua negara di Dunia termasuk Indonesia. Jumlah penduduk yang besar dapat menimbulkan permasalahan ketenagakerjaan, salah satunya adalah pengangguran. Pertumbuhan yang terjadi pada jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja ternyata tidak diimbangi oleh tingginya penyerapan tenaga kerja yang ada. Akibat

dari kurangnya penyerapan tenaga kerja yang tersedia akan menimbulkan tingkat pengangguran yang cukup tinggi.

Masalah pengangguran juga termasuk kedalam usaha-usaha yang mengurangi pengangguran dengan menggunakan rencana pembangunan ekonomi yang menyertakan rencana ketenagakerjaan secara matang. Di samping itu, disertai pula kesadaran akan ketenagakerjaan yang lebih demokratis menyangkut hak-hak memilih pekerjaan, lapangan pekerjaan, lokasi pekerjaan sesuai kemampuan, kemauan tenaga kerja tanpa diskriminasi. Masalah tersebut merupakan masalah yang kompleks karena memengaruhi oleh banyak nya faktor yang salah satunya adalah jumlah penduduk yang berdasarkan tingkat pengangguran dapat dilihat dari kondisi suatu negara.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak Kementerian dan Tenaga Kerja Transportasi (Kemenakertrans) adalah dengan memfasilitasi perluasan dan kesempatan kerja, melalui pemagangan dalam negeri dan luar negeri, program padat karya produktif, padat karya inovatif dan wirausaha baru.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) meranti, angka pengangguran dari tahun 2010-2017 dapat terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di kabupaten kepulauan meranti mengalami fluktuasi dari tahun ketahun. hal tersebut dapat dikatakan bahwa pengangguran di meranti sedang naik turun. Dari data tersebut dapat dilihat dari tabel jumlah pengangguran yang cukup besar pada tahun 2014 sebesar 11.76%.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan jumlah penduduk dan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang perekonomiannya memiliki jumlah tenaga kerja yang besar dengan tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Riau. Berikut tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2010-2017 (%).

No	Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
1	2010	6.70
2	2011	8.59
3	2012	8.63
4	2013	6.99
5	2014	11.76
6	2015	9.37
7	2016	7.46
8	2017	4.54

Sumber: Badan Pusat Statistik Riau, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kepulauan Meranti dari tahun 2010-2017 mengalami fluktuasi. Adapun tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 11.76%. sedangkan tingkat pengangguran terbuka terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 4.54%.



Pengangguran merupakan isu penting dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Meranti dan beberapa indikator ekonomi yang dapat mempengaruhi besarnya tingkat pengangguran diantaranya adalah produk domestik regional bruto (PDRB) dan upah minimum kabupaten (UMK), berpengaruh terhadap pengangguran di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pada saat ini penduduk di Kepulauan Meranti berdasarkan Kecamatan dengan rata-rata 3%, hal ini tentunya akan menjadi faktor pendorong prekonomian Kabupaten Kepulauan Meranti, mengingat masih banyaknya sumber daya yang tersedia di daerah tersebut masih kurang termanfaatkan secara baik, dengan pertumbuhan penduduk yang baik akan diimbangi dengan jumlah penduduk, PDRB, dan UMK. Maka sumber daya manusia di daerah tersebut akan meningkat atau membaik. Sehingga kurangnya masalah pengangguran yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut.

Pengangguran terbuka tentu memberi efek buruk dari mengurangi tingkat pendapatan masyarakat dan dengan begitu akan memberikan dampak domino mengurangi tingkat kemakmuran. Semakin turun tingkat kemakmuran masyarakat tentunya akan meningkatkan peluang terjebak dalam pengangguran dan akan menimbulkan masalah lain yaitu kekacauan politik dan sosial. (Sukirno, 2010).

Untuk mengatasi pengangguran terbuka yang semakin tinggi, sebagian masyarakat berinisiatif untuk membuat lapangan pekerjaan sendiri. Akan tetapi untuk terlaksananya hal tersebut membutuhkan modal yang tidak sedikit dalam melaksanakan keinginan itu sendiri. Oleh karena itu, semakin besar penduduk memilih pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang dan kemampuannya, dengan

anggapan bahwa lebih baik bekerja dari pada tidak bekerja. Berikut penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti, secara terinci dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2010-2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Laju Pertumbuhan (%)
		2010	2016	2017	2010-2017
1	Tebing Tinggi Barat	15.254	15.809	15.916	0,608
2	Tebing Tinggi	54.306	56.192	56.540	0,577
3	Tebing Tinggi Timur	11.325	11.733	11.811	0,602
4	Rangsang	17.875	18.523	18.347	0,605
5	Rangsang Pesisir	16.405	16.971	17.075	0,573
6	Rangsang Barat	16.878	17.448	17.550	0,559
7	Merbau	13.691	14.174	14.264	0,581
8	Pulau Merbau	14.472	14.975	15.068	0,578
9	Tasik Puyu	15.783	16.327	16.426	0,572

Sumber : BPS dan Dinas Sosial Kab. kepulauan meranti Tahun, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Adapun kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Tebing Tinggi yaitu sebanyak 56.540 jiwa dengan laju pertumbuhan

sebesar 0,577 persen, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya pada tahun 2017 yaitu kecamatan Tebing Tinggi Timur sebanyak 11.811 jiwa dengan laju pertumbuhan 0,602 persen.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah, ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan, menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik.

Berdasarkan menurut Mankiw (2006), yang melihat hubungan antara tingkat pengangguran dan *Gross Domestic Product* (GDP), menyatakan setiap terjadi peningkatan pada persentase tingkat pengangguran di suatu negara maka hal tersebut setara dengan terjadinya penurunan terhadap GDP sebesar 2 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan terhadap tingkat pengangguran suatu negara dapat dikaitkan dengan rendahnya dalam GDP negara .

Salah satu implikasi menonjol atas tingginya angka kelahiran di negara-negara berkembang adalah hampir 40% penduduknya terdiri atas anak-anak yang berumur kurang dari 15 tahun. Jadi, angkatan kerja produktif di Negara-negara berkembang harus menanggung beban yang lebih banyak untuk menghidupi anak-

anak yang secara proporsial jumlahnya hampir dua kali lipat dibandingkan dengan yang ada di negara-negara kaya. Penduduk yang berusia lanjut maupun yang masih anak-anak secara ekonomis disebut beban ketergantungan (*dependency burden*). artinya, mereka merupakan anggota masyarakat yang tidak produktif sehingga menjadi beban angkatan kerja produktif yang berumur 15 sampai 64 tahun.

Hal tersebut berarti dinegara berkembang tidak hanya dibebani oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, tetapi juga harus menanggung beban ketergantungan yang cukup berat. Beberapa tahun terakhir ini indonesia dilanda krisis berkepanjangan. Hal ini berdampak sistem perekonomian semakin meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut, sebagian masyarakat berinisiatif untuk membuat lapangan pekerjaan sendiri. Akan tetapi untuk melaksanakan hal tersebut membutuhkan modal tidak sedikit, jadi tetap ada banyak orang yang menganggur. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat memilih pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidangnya (ilmu yang diperoleh), dengan anggapan bahwa lebih baik bekerja daripada tidak bekerja.

Pada latar belakang uraian diatas yang melatar belakangi penulis tertarik menuangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul “PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN UPAH MINIMUM KABUPATEN TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas pada latar belakang masalah maka penulis merumuskan: ”apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Kepulauan Meranti?”

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Kepulauan Meranti”.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi pemerintah, diharapkan sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran yang dapat dipertimbangkan bagi pemerintah.
- b. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam rangka memperkaya khasanah penelitian yang sudah ada.
- c. Bagi penulis, kegiatan ini merupakan langkah awal dari pengaplikasian ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah jurusan ekonomi pembangunan fakultas ekonmi universitas islam riau, serta pengalaman yang bisa dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman, maka penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab dan dari masing-masing bab dibagi beberapa sub bab dalam sistematika sebagai berikut.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang melandasi dan mendukung dalam penulisan ini serta mengajukan hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari penelitian yang dilakukan.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

Pada bab ini dikemukakan tentang gambaran umum tentang Kabupaten Kepulauan Meranti dari kondisi geografi daerah, penduduk, jumlah penduduk, PDRB, upah minimum dan tingkat pendidikan.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini dikemukakan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh produk domestic regional bruto dan upah minimum kabupaten terhadap tingkat pengangguran di kabupaten kepulauan meranti.

**BAB VI : PENUTUP**

Merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran penulis sebagai sumbangan pemikiran.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1 Pengangguran

Menurut Wikipedia (2007) pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedangkan mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapkannya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Definisi pengangguran secara teknis adalah semua orang dalam referensi waktu tertentu, yaitu pada usia angkatan kerja yang tidak bekerja, baik dalam arti mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian mencari pekerjaan, dalam arti mempunyai kegiatan aktif mencari kerja tersebut. Selain definisi diatas masih banyak istilah arti definisi pengangguran diantaranya.

Menurut Sukirno (2006) pengangguran adalah seseorang yang digolongkan dalam angkatan kerja, sedangkan aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi belum memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Sedangkan penduduk yang sedang mencari pekerjaan disebut pengangguran yang dikenal dengan pengangguran terbuka (pengangguran penuh) dan pengangguran



terselubung. Bagian utama dari kelompok ini menunjukkan definisi status pasar kerja. Keadaan angkatan kerja atau menunggu penarikan diri sebuah pekerjaan. Dalam angkatan kerja ini bagi mereka yang tidak bekerja disebut pengangguran. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja atau sedang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan baik dengan cara melamar langsung ke perusahaan maupun relasi atau cara lain. Termasuk disini adalah mereka yang sedang menunggu jawaban atas lamarannya.

Untuk dapat digolongkan sebagai pengangguran ada 3 kriteria yang harus dipenuhi secara bersama-sama, kriteria-kriteria tersebut adalah :

1. Tidak bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan;
2. Bersedia bekerja atau menerima pekerjaan;
3. Sedang mencari pekerjaan selama seminggu yang lalu

Yang digolongkan mencari pekerjaan :

- a. Mereka yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih mencari pekerjaan lain;
- b. Mereka yang dibebaskan tugas dan yang akan dipanggil kembali, tetapi sedang berusaha mendapatkan pekerjaan lain;
- c. Mereka yang bekerja sedikit 1 jam selama seminggu yang lalu dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan lain;
- d. Mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan;
- e. Mereka yang sudah pernah bekerja kemudian karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang mencari pekerjaan lain;

- f. Mereka yang biasanya sekolah atau mengurus rumah tangga dan sedang mencari pekerjaan lain.

Pengangguran merupakan tenaga kerja yang tidak mempunyai kesempatan kerja, sedangkan tenaga kerja merupakan sebagian dari permasalahan terhadap jumlah tenaga kerja, terutama pertumbuhan penduduk akan berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja, terutama penambahan penduduk usia kerja. Oleh karena itu peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan penambahan kesempatan kerja yang tidak diimbangi dengan penambahan kesempatan kerja akan menyebabkan pengangguran.

Tingkat pengangguran juga menunjukkan persentase jumlah orang yang ingin bekerja tetapi belum memperoleh pekerjaan. Ukuran seseorang sudah dapat disebut bekerja sangat bervariasi antar negara. Bahkan antar lembaga yang berbeda didalam suatu negara definisi bekerja juga berbeda. Terdapat dua pendekatan yang lazim digunakan untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pengangguran.

1. Pendekatan angkatan kerja (*Labour Unization Approach*)

Pendekatan ini didefinisikan tentang tenaga kerja dan angkatan kerja dalam mendefinisikan pengangguran.

2. Pendekatan Permanfaatan Tenaga Kerja (*Labour Unization Approach*)

Indikator pengangguran menurut pendekatan ini didasarkan pada tingkat pemanfaatan tenaga kerja. Ukuran yang digunakan untuk menghitung tingkat pemanfaatan tenaga kerja, produktivitas dan pendapatan yang diperoleh.

### 2.1.1.1 Jenis-Jenis Pengangguran

Menurut Arsyad (1999), pekerja yang menganggur bukan disebabkan mereka mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, melainkan pada upah yang berlaku, penawaran (*supply*) tenaga kerja melebihi permintaan (*demand*) Para pekerja tersebut hanya menunggu pekerjaan tersebut menjadi lowongan.

Menurut sebab terjadinya, pengangguran dapat digolongkan dari beberapa jenis dibawah ini yaitu :

#### 1) Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah tidak berkerjanya tenaga kerja yang seharusnya memiliki pekerjaan. Faktor-faktor penyebabnya pun beranekaragam, beberapa diantaranya di indefikasikan dan dibahas sebagai berikut:

- a. Para pencari lapangan pekerjaan tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan pengguna tenaga kerja sehingga meskipun sebenarnya tersedia lapangan kerja tertentu, para pencari pekerja tidak dapat menerima karena tidak memenuhi berbagai persyaratan yang dituntut oleh organisasi atau perusahaan.
- b. Terjadinya kelesuan dibidang ekonomi sehingga berbagai organisasi dan perusahaan terpaksa mengambil keputusan untuk tidak merekrut tenaga kerja baru.
- c. Meskipun situasi perekonomian tidak mengalami kelesuan atau bahkan mengalami pertumbuhan yang mengembirakan, tuntutan

persaingan, tuntutan para pemilik modal dan memiliki saham sering berakibat pada terjadinya restrukturisasi.

- d. Kurang jiwa kewirausahaan, dunia perekonomian pada umumnya menuntut makin banyaknya warga masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan.
- e. Kurangnya kesempatan berusaha, meskipun banyak warga masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan, kesempatan menjadi pengusaha tidak selalu terbuka.

## 2) Pengangguran Terselubung

Pengangguran terselubung adalah mereka yang mempunyai pekerjaan, tetapi karena tingkat produktivitasnya yang rendah. Pengangguran terselubung bisa timbul karena beberapa faktor penyebabnya diantaranya:

- a. Ketika suatu organisasi berkembang pesat, misalnya karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi, banyak organisasi yang memperluas usaha dan kegiatannya dan untuk itu merekrut tenaga kerja baru memang diperlukan.
- b. Karena organisasi tidak mempunyai rencana ketenagakerjaan yang mantap, perencanaan ketenagakerjaan yang tidak mantap antara lain berarti tidak dilakukan analisis yang tepat tentang permintaan atau tenaga kerja dimasa depan.

## 3) Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman adalah mereka yang mempunyai pekerjaan, tetapi karena pergantian musim/kondisi buruk, sehingga produktivitasnya tidak

dapat dilanjutkan. Pengangguran musiman paling jelas tampak pada bidang pertanian. Masyarakat pertanian hanya sibuk pada waktu-waktu tertentu saja seperti pada musim tanam atau musim panen. Jika terus bertahan dan tingkat disesa, antara kedua musim tersebut petani tidak mempunyai kegiatan menambah sumber penghasilan keluarga.

Berdasarkan pada penyebab terjadinya, pengangguran dapat digolongkan kepada empat jenis pengangguran, yaitu :

- a. Pengangguran normal atau friksional yaitu pengangguran yang disebabkan oleh keinginan para pekerja-pekerja untuk mencari kerja yang lebih baik atau yang lebih sesuai untuk mereka.
- b. Pengangguran silikal yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kemerosokan kegiatan ekonomi yang biasanya berlaku sebagai akibat kemerosokan dalam pengeluaran atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian tersebut.
- c. Pengangguran struktural yaitu pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi.
- d. Pengangguran teknologi yaitu pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya (sukirno, 2006).

#### 2.1.1.2 Cara Mengatasi Pengangguran

Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat dalam mengatasinya. Adapun dalam mengatasinya masih kebanyakan orang kehilangan pekerjaan yang berarti penurunan standar kehidupan dan rekanan psikologis. Jadi tidaklah

mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politis sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja (Mankiw, 2006).

Secara umum cara mengatasi pengangguran adalah dengan meningkatkan investasi, meningkatkan kualitas SDM, transfer teknologi dan penemuan teknologi baru, pembenahan perangkat hukum dalam bidang ketenagakerjaan, dan lainlain. Secara teknis kebijakan upaya-upaya ke arah itu dapat ditempuh dengan berbagai kebijakan misalnya :

1. Menyelenggarakan bursa pasar kerja

Bursa tenaga kerja adalah penyampaian informasi oleh perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak yang membutuhkan tenaga kerja kepada masyarakat luas. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar terjadi komunikasi yang baik antara perusahaan dan pencari kerja. Selama ini banyak informasi pasar kerja yang tidak mampu tersosialisasikan sampai ke masyarakat, sehingga mengakibatkan informasi lowongan kerja hanya bisa diakses oleh golongan tertentu.

- a. Menggalakkan kegiatan ekonomi informal

Kebijakan yang memihak kepada pengembangan sektor informal, dengan cara mengembangkan industri rumah tangga sehingga mampu menyerap tenaga kerja. Dewasa ini telah ada lembaga pemerintah yang khusus menangani masalah kegiatan ekonomi informal yakni Departemen Koperasi dan UKM. Selain itu dalam pengembangan sektor informal diperlukan keterpihakan dari Pemda setempat.

b. Meningkatkan mutu pendidikan

Mendorong majunya pendidikan, dengan pendidikan yang memadai memungkinkan seseorang untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik. Dewasa ini sesuai dengan perintah undang-undang, pemerintah diamanatkan untuk mengalokasikan dana APBN sebesar 20% untuk bidang pendidikan nasional.

c. Mendirikan pusat-pusat latihan kerja

Pusat-pusat latihan kerja perlu didirikan untuk melaksanakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi yang ada.

d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Pemerintah perlu terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga akan memberikan peluang bagi penciptaan kesempatan kerja.

e. Mendorong investasi

Pemerintah perlu terus mendorong masuknya investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menciptakan kesempatan kerja di Indonesia.

f. Meningkatkan transmigrasi

Transmigrasi merupakan langkah pemerintah meratakan jumlah penduduk dari pulau yang berpenduduk padat ke pulau yang masih jarang penduduknya serta mengoptimalkan sumber kekayaan alam yang ada.

g. Melakukan deregulasi dan debirokrasi

Deregulasi dan debirokrasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru. Deregulasi artinya adalah perubahan peraturan aturan main terhadap bidang-bidang tertentu. Deregulasi biasanya ke arah penyederhanaan peraturan. Debirokrasi artinya perubahan struktur aparat pemerintah yang menangani bidang - bidang tertentu. Debirokrasi biasanya ke arah penyederhanaan jumlah pegawai/lembaga pemerintah yang menangani suatu urusan tertentu.

h. Memperluas lapangan kerja

Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru terutama yang bersifat padat karya. Dengan adanya era perdagangan bebas secara regional dan internasional sebenarnya terbuka lapangan kerja yang semakin luas tidak saja di dalam negeri juga ke luar negeri. Ini tergantung pada kesiapan tenaga kerja untuk bersaing secara bebas di pasar tenaga kerja internasional.

### 2.1.1.3 Dampak Pengangguran

Pengangguran sangat berdampak pada kehidupan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang menurun, dan bahkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun adalah salah satu dampak pengangguran. Beberapa akibat buruk dari pengangguran dibedakan kepada dua aspek (Sukirno,2002) dimana dua aspek tersebut yaitu :



1) Akibat buruk terhadap kegiatan perekonomian

Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tangguh. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran. Akibat-akibat buruk tersebut dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Pengangguran menyebabkan tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya.
- b. Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Pengangguran diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, dan dalam kegiatan ekonomi yang rendah pendapatan pajak pemerintah semakin sedikit.
- c. Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. Yang pertama, pengangguran tenaga buruh diikuti pula oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Kedua, pengangguran yang diakibatkan oleh keuntungan kelesuan kegiatan perusahaan yang rendah menyebabkan berkurangnya keinginan untuk melakukan investasi.

2) Akibat buruknya terhadap individu dan masyarakat

Pengangguran akan mempengaruhi kehidupan individu dan kestabilan sosial dalam masyarakat. Beberapa keburukan sosial yang diakibatkan oleh pengangguran adalah :

- a. Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan.
- b. Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Keterampilan dalam mengerjakan suatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek.
- c. Pengangguran dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat terhadap pemerintah.

#### 2.1.1.4 Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran

Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi karena sangat berpengaruh kepada perkembangan suatu negara. Pemerintah harus berperan dalam mengatasi masalah pengangguran. Upaya Pemerintah dalam mengatasi pengangguran dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang meminimalisir akan terjadinya pengangguran.

Karena setiap warga negara berhak mempunyai pekerjaan dan memiliki kehidupan yang layak seperti halnya yang tercantum pada pasal 27 UUD 1945 yang berbunyi " *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, maka pemerintah wajib menyediakan lapangan kerja dan melindungi hak-hak tenaga kerja*". Oleh karena itu pemerintah harus dapat memberikan berbagai solusi dan berupaya untuk menurunkan atau mengatasi masalah pengangguran yang ada. Berikut ini beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah harus membuat pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pencari kerja agar mampu mandiri dari ekonomi. Misalnya Pemerintah member pelatihan Kewirausahawan agar mereka mampu berwirausaha dan menciptakan produk.
2. Pemerintah harus membuat pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pencari kerja agar mampu mandiri dari ekonomi yang dihadapi. Misalnya Pemerintah memberi pelatihan Kewirausahawan agar mereka mampu berwirausaha dan menciptakan produk.
3. Pemerintah menyokong dan memperluas objek wisata di daerah-daerah yang berpotensi dalam pengembangan pariwisata. Dan meningkatkan pemasukan daerah. Pengembangan pariwisata di suatu daerah sangat berdampak baik dengan adanya pengembangan wisata daerah mampu menyedot tenaga kerja dan memancing para investor untuk menanam saham di negara Indonesia. mampu menyedot para wisatawan yang akan berwisata, itu akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Daerah yang memiliki objek wisata akan menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat serikat dan akan mampu mengurangi angka pengurusan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Pemerintah dan masyarakat harus menyokong wisata kuliner. Di era 2000 ini Wisata kuliner menjadi salah satu income yang sangat tinggi. Dengan banyaknya wisata kuliner mampu mempercepat kegiatan ekonomi yang akan merangsang masyarakat dalam membuka usaha kuliner yang akan

membutuhkan para pekerja yang nantinya akan menurunkan angka pengangguran.

5. Pemerintah harus mampu merangsang para investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Investasi merupakan hal yang penting dalam pembangunan ekonomi karena sebagai faktor penunjang didalam peningkatan proses produksi. Investasi memiliki berperan aktif dalam menentukan tingkat output, dan laju pertumbuhan output tergantung pada laju investasi. Investasi akan memperluas Kesempatan kerja dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat sebagai konsenkweni naiknya pendapatan yang diterima masyarakat. Dengan meningkatkan kesejahteraan sehingga mengurangi jumlah pengangguran.

#### 2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi daerah dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita kenaikan pendapatan merupakan penerimaan dan timbulnya perubahan dalam kesejahteraan ekonomi suatu daerah ditujukan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (Arsyad, 1997). Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai barang yang diproduksi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu dalam tahun tertentu baik yang dihasilkan oleh perusahaan dalam negeri maupun yang dihasilkan oleh perusahaan luar negeri.

Produk domestic regional bruto adalah jumlah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestic suatu wilayah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Hal

tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi produk domestic regional bruto di suatu wilayah maka akan semakin tinggi pula tingkat pengangguran terbuka dan sebaliknya, (Safrudi, 2018)

Penyajian angka PDRB biasanya dibedakan menjadi dua yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas harga konstan. PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai dari barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan memakai harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (*base year*) yaitu tahun 2000. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan sebagai alat untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun (Badan Pusat Statistik, 2012), yaitu :

1) Pendapatan Produksi

PDRB adalah jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha, yaitu :

- a. Pertanian, Perkebunan, Perternakan, Kehutanan dan Perikanan;
- b. Pertambangan dan Pengadiln;
- c. Industri Pengelolaan;
- d. Listrik, Gas dan Air Bersih;
- e. Bangunan;

- f. Perdagangan, Hotel dan Restoran;
- g. Pengangkutan dan Komunikasi;
- h. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan;
- i. Jasa-jasa.

2) Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang diikuti serta dalam proses produksi yang diikuti serta dalam proses produksi suatu wilayah jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksudkan adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan penghasilan dan pajak tak langsung lainnya.

3) Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir, yaitu :

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung.
2. Konsumsi pemerintah.
3. Pembentukan modal tetap domestik bruto.
4. Perubahan stok.
5. Ekspor neto yang dihitung dari ekspor dikurangi impor.

2.1.3 Upah Minimum Kabupaten (UMK)

Upah minimum kabupaten ( UMK ) adalah hak pekerja/buruh yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan

kepada pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. UMK juga dapat diartikan bahwa semakin tinggi upah minimum kabupaten di suatu wilayah maka semakin rendah tingkat pengangguran terbuka, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah upah minimum kabupaten di suatu wilayah maka semakin tinggi tingkat pengangguran di wilayah tersebut, (Safrudi, 2018)

Upah merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran, karena tingkat upah yang dilakukan pemerintah pada suatu negara akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran yang ada, semakin tinggi besaran upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut. Sehingga semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan maka akan membawa pengaruh pada tingginya tingkat pengangguran yang terjadi (Kaufman dan Hotckiss, 1999). Hal ini bisa terjadi karena semakin tinggi upah yang ditetapkan maka akan berpengaruh pada peningkatan biaya output yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Akibatnya suatu perusahaan akan melakukan efisiensi terhadap produksinya dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerjanya.

#### A. Pengertian Upah

Upah merupakan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, gaji, imbalan, hasil akibat (dari suatu perbuatan), resiko (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002).

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

#### B. Jenis-jenis Upah

Jenis-jenis upah dalam berbagai kepustakaan Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja menurut Zaeni Asyhadie (Zaeni Asyhadie, 2007) dapat dikemukakan sebagai berikut:

##### 1) Upah Nominal

Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuanketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

##### 2) Upah Nyata (Riil Wages)

Upah nyata adalah uang nyata, yang benar-benar harus diterima seorang pekerja/buruh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan tergantung dari:

- a) besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima;
- b) besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan



### 3) Upah Hidup

Upah hidup, yaitu upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya, seperti pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain.

### 4) Upah Minimum

Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standar, oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya. Upah minimum ini umumnya ditentukan oleh pemerintah (cq. Gubernur dengan memerhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi. dan/atau bupati/walikota), dan setiap tahun kadangkala berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum, yaitu :

- a) Untuk menonjolkan arti dan peranan pekerja/buruh sebagai subsistem dalam suatu hubungan kerja;
- b) Untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan yang secara materiil kurang memuaskan;
- c) Untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan;
- d) Untuk mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian kerja dalam perusahaan;
- e) Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidup secara normal.

## 5) Upah Wajar

Upah wajar adalah upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja/buruh sebagai imbalan atas jasa jasanya pada perusahaan. Upah wajar ini sangat bervariasi dan selalu berubah-ubah antar upah minimum dan upah hidup sesuai dengan faktor-faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah :

- a) Kondisi perekonomian negara;
- b) Nilai upah rata-rata di daerah tempat perusahaan itu berada;
- c) Peraturan perpajakan;
- d) Standar hidup para pekerja/buruh itu sendiri;
- e) Posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian negara.

### C. Tinjauan umum mengenai upah minimum

Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, upah minimum adalah Upah Bulanan Terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.

Dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menentukan bahwa Pemerintah dalam hal ini Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan/atau bupati/walikota, menetapkan upah minimum berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak dan perlindungan pengupahan, penetapan upah minimum dan pengenaan denda terhadap pekerja/buruh yang

melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaian diatur dengan peraturan pemerintah (Hardijan Rusli, 2011).

Upah minimum diarahkan kepada pencapaian KHL yaitu setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yang besarnya ditetapkan Menaker (Menteri Tenaga Kerja). Pencapaian KHL perlu dilakukan secara bertahap karena kebutuhan hidup minimum yang sangat ditentukan oleh kemampuan dunia usaha. (Hardijan Rusli, 2011).

Upah minimum dapat terdiri atas:

- a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
- b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. (Hardijan Rusli, 2011). Upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk kabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi atau nasional, dan tidak boleh rendah dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya yang dijadikan bahan rujukan untuk penelitian ini, sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil
1	Isnayanti (2017)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	Dari variabel independen jumlah penduduk angkatan kerja, inflasi,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel angkatan kerja

		Tingkat Pengangguran Diprovinsi Sumatra Utara	<p>pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan tingkat pendidikan tamatan menengah atas di provinsi Sumatera Utara sedangkan variabel dependen adalah pengangguran. independen (X) terhadap variabel dependen (Y) menjadi :</p> <p>Dimana  <math>Y =</math> Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)  <math>X_1 =</math> Jumlah penduduk Angkatan Kerja (Jiwa)  <math>X_2 =</math> Inflasi (Persen)  <math>X_3 =</math> Pertumbuhan Ekonomi (Milyar Rupiah)  <math>X_4 =</math> Upah Minimum (Rupiah)  <math>X_5 =</math> Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)  <math>b_0 =</math> Bilangan Konstanta  <math>b_1 =</math> Koefisien jumlah angkatan kerja  <math>b_2 =</math> Koefisien regresi Inflasi  <math>b_3 =</math> Koefisien regresi Pertumbuhan ekonomi  <math>b_4 =</math> Koefisien regresi Upah Minimum  <math>b_5 =</math> Koefisien regresi Tingkat Pendidikan</p>	<p>berpengaruh positif sebesar 3,059904% dan tidak signifikan, inflasi berpengaruh positif sebesar 0,020060% dan tidak signifikan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif sebesar 3,105293% dan signifikan, upah minimum berpengaruh negatif sebesar 1,003877% dan signifikan, dan rata-rata lama sekolah berpengaruh positif sebesar 0,282733% dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di provinsi sumatera utara tahun 1978-2014. Faktor yang paling dominan mempengaruhi tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara tahun 1978-2014 dalam penelitian ini adalah faktor pertumbuhan ekonomi.</p>
2	Lusi Novalia	Faktor-Faktor	Variabel dalam	Hasil penelitian

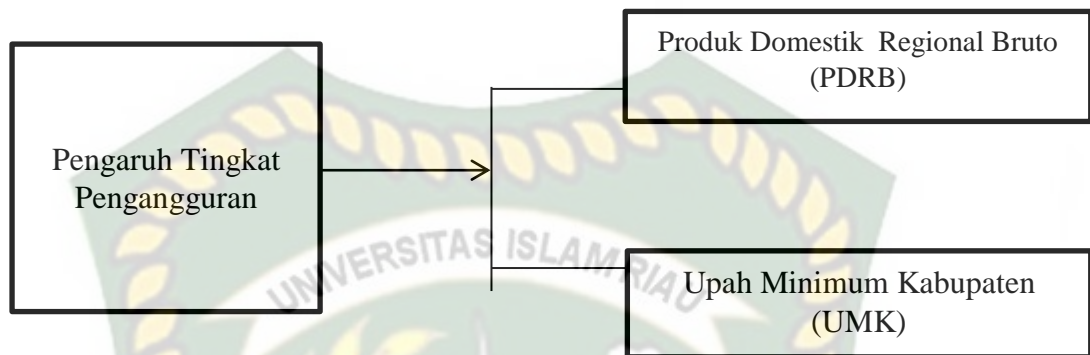
	(2014)	<p>Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau</p>	<p>penelitian ini terdiri dari empat variabel dimana satu variabel dependen yaitu tingkat pengangguran dan tiga variabel independen yaitu tingkat upah minimum (X1), tingkat PDRB (X2) dan tingkat kesempatan kerja (X3).</p>	<p>yang dilakukan dari pengujian koefisien dari analisis linear regresi berganda , menunjukkan bahwa jumlah penduduk, inflasi, upah minimum, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran Di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang ada Di Kabupaten Kuantan Singingi dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan, peningkatan yang ada disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk asli Kuantan Singingi ataupun juga penduduk pendatang dari luar Kabupaten Kuantan Singingi. Jumlah pengangguran yang ada justru berdampak sedikit masalah dalam</p>
--	--------	---	---	---

				<p>menambahkan jumlah pengangguran yang ada. Dengan adanya jumlah penduduk, infansi, upah minimum, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan yang berarti jumlah penduduk yang ada Di Kabupaten Kuantan Singingi mengalami peningkatan.hal tersebut di kabupaten kuantan singngi mengalami peningkatan yang cukup tinggi.</p>
--	--	--	--	---

3	MOHAMAT SAFRUDI	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Terbuka Di Karesidenan Pati Tahun 2007-2015	<p>Dalam penelitian ini Metode common-constant (pooled ordinary least square atau PLS) <math>TPT_{it} = \beta_0 + \beta_1 LOG (UMK_{it}) + \beta_2 LOG (PDRB_{it}) + \beta_3 LOG (IPM_{it}) + uit</math></p> <p>Keterangan :</p> <p>PT<sub>it</sub>:Pengangguran untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t</p> <p>UMK<sub>it</sub>: Upah minimum kabupaten</p> <p>PDRB<sub>it</sub>:Produk domestik regional bruto</p> <p>IPM<sub>it</sub> :Indeks pembangunan manusia</p> <p>i: menunjukkan kota dan kabupaten</p> <p>t: Menunjukkan deret waktu 2007-2015</p> <p>ut: Variabel pengganggu</p>	<p>Hasil penelitian mengenai analisis pengaruh upah minimum kabupaten, produk domestik regional bruto, dan indeks pembangunan manusia terhadap pengangguran terbuka di karesidenan Pati tahun 2007-2015 dapat diambil simpulan sebagai berikut UMK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. PDRB berpengaruh positif dan signifikan sedangkan IPM menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Karesidenan Pati tahun 2007-2015</p>
---	-----------------	--	--	--

### 2.3 Kerangka Pikir

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang memiliki tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi. Analisis menggunakan alat rumus Regresi Linear berganda.



#### 2.4 Hipotesis

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan perumusan masalah tersebut, setelah dihubungkan dengan penelitian sebelumnya, oleh peneliti MOHAMMAD SAFRUDI yang menyatakan bahwa bahwa “Produk Domestik Regional Bruto ( $X_1$ ) dan upah minimum kabupaten ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap tingkat pengangguran ( $y$ ) di kabupaten kepulauan meranti.”



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi / Objek Penelitian

Penelitian ini didaerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Daerah penelitian ini sengaja dipilih berdasarkan atas perimbangan situasi dan kondisi perkembangan penduduk yang terus berjalan, berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto dan Upah Minimum Kabupaten. Di sisi lain segala pengangguran terus meningkat.

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang di perlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari instansi-instansi terkait yang ada hubungannya dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, penulis mengambil data dari:

1. BPS Kabupaten Kepulauan Meranti:
  - a. Keadaan Letak Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti
  - b. Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti
  - c. Pemerintahan, Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dll.
2. BPS Kota Pekanbaru:
  - a. Pengangguran,
  - b. Dan Angkatan Kerja
3. Dinas Komunikasi Dan Informasi
  - a. Upah Minimum Kabupaten
  - b. Pertumbuhan penduduk (PDRB)

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk kelengkapan data penelitian ini, langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam pengumpulan data sebagai berikut :

- a) Library Research (Study Kepustakaan) yakni suatu teknik pengumpulan data dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang diambil.
- b) Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung baik terhadap lokasi penelitian secara umum maupun keadaan responden itu sendiri.
- c) Teknik Asurvey yaitu dokumentasi data yang telah diterbitkan oleh pihak lain kemudian dianalisis kembali.

### 3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis deskriptif yaitu menganalisis data dengan menggambarkan sejumlah peristiwa dan objek penelitian yang ditabulasikan kedalam tabel-tabel serta mengkaitkan teori yang ada hubungannya dengan permasalahan tersebut. Disamping itu, menggunakan metode yang bersifat analisa kuantitatif yaitu analisa dengan mengukur kuatnya hubungan linier antara variabel bebas dan variabel terikat. Metode analisis data yang digunakan dalam pengolahan hasil penelitian ini ialah metode analisis regresi berganda untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dan untuk mengolah data digunakan alat bantu komputer dengan menggunakan program

Eviews 9. Adapun persamaan regresi linear berganda yang dapat digunakan adalah sebagai berikut : (Supranto, 2003)

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + e$$

Sumber : Statistik Teori dan Aplikasi

Keterangan : Y = Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

X<sub>1</sub> = Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah)

X<sub>2</sub> = Upah Minimum Kabupaten (Rupiah)

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, = Parameter yang akan diestimasi

e = Error Term ( kesalahan )

Sedangkan untuk mengetahui tingkat signifikan dari masing-masing koefisien regresi variabel independen terhadap variabel dependen maka dapat menggunakan alat analisis eviews, dimana akan diketahui tingkat signifikan Produk Domestik Regional Bruto dan Upah Minimum Kabupaten berpengaruh terhadap Pengangguran di Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun uji statistik yang akan dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (produk domestik regional bruto dan upah minimum kabupaten) terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut.

a. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

R<sup>2</sup> digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi variabel dependen dijelaskan oleh semua variabel independen (Widarjono, 2013). Nilai R<sup>2</sup> terletak antara 0 sampai dengan 1. Jika R<sup>2</sup> yang diperoleh mendekati 1, maka sumbangan dari variabel independen terhadap variasi variabel dependen semakin

besar. Sebaliknya jika  $R^2$  mendekati 0, maka sumbangan dari variabel independen terhadap variasi variabel dependen semakin kecil.

b. Uji T (Uji Parsial)

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Adapun ketentuannya sebagai berikut.

- 1) Prob.  $< 0.05$  maka  $H_0$  ditolak, artinya masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Prob.  $< 0.05$  maka  $H_0$  diterima, artinya masing-masing variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji F

Digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen berupa modal, bahan baku serta tenaga kerja secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu produksi tahu. Kriteria pengujiannya antara lain.

- 1) F prob.  $< 0.05$  maka  $H_0$  ditolak, artinya secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) F prob.  $> 0.05$  maka  $H_0$  diterima, artinya secara simultan variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

d. Uji Asumsi Klasik

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya penyimpangan atas asumsi klasik.

Penyimpangan tersebut antara lain:

1) Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah kedua variabel dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Menurut Widarjono (2013) ada 2 metode untuk mengetahui apakah model regresi tersebut normal atau tidak, antara lain sebagai berikut.

- a) Histogram Residual, ciri utamanya yaitu bentuk grafik distribusi normal ialah menyerupai lonceng, apabila tidak berbentuk lonceng maka model regresi tersebut mempunyai distribusi tidak normal.
- b) Uji Jarque-Bera, model regresi yang mempunyai distribusi normal nilai JB nya harus diatas nilai Chi Square.

2) Uji Multikolinieritas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan linear antara variabel independen. Adanya hubungan antara variabel dalam satu regresi disebut dengan multikolinieritas. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinieritas dilakukan dengan memperhatikan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) Nilai  $VIF < 10$ , maka tidak terkena multikolinieritas.
- b) Nilai  $VIF > 10$ , maka terkena multikolinieritas.

### 3) Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu metode yang digunakan untuk pengujian heteroskedastisitas ialah metode white. Metode white mengembangkan sebuah metode yang tidak memerlukan asumsi tentang adanya normalitas pada variabel gangguan (Widarjono, 2013). Cara mendeteksi apakah model regresi tersebut terjadi heteroskedastisitas atau tidak, bisa dilihat dari nilai *chi square* ( $Obs \cdot R^2$ ) dan nilai kritis *chi square* dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) Nilai *chi square* < nilai kritis, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
- b) Nilai *chisquare* > nilai kritis, maka terjadi heteroskedastisitas.

### 4) Uji Autokolerasi

Uji Autokolerasi merupakan suatu analisis statistic yang dilakukan untuk mengetahui apakah kolerasi variable yang ada didalam model prediksi dengan perubahan waktu. Maka dari itu, apabila asumsi autokolerasi terjadi pada suatu model prediksi, maka nilai disturbance tidak lagi berpasangan secara bebas, melainkan berpasangan secara autokolerasi.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

#### 4.1 Letak dan Keadaan Geografis

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Secara geografis kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar  $0^{\circ} 42' 30'' - 1^{\circ} 28' 0''$  LU, dan  $102^{\circ} 12' 0'' - 103^{\circ} 10' 0''$  BT, dan terletak pada bagian pesisir Timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-GT ) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tj. Balai Karimun.

Serta Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara/Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota Pusat Kegiatan Strategis Negara yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan

industri. Luas kabupaten Kepulauan Meranti : 3707,84 km<sup>2</sup>, sedangkan luas kota Selatpanjang adalah 45,44 km<sup>2</sup>.

Batas –batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan selat malaka, Kabupaten Bengkalis
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan hasil penafsiran peta topografi dengan skala 1 : 250.000 diperoleh gambaran secara umum bahwa kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar bertopografi datar dengan kelerengan 0–8 %, dengan ketinggian rata-rata sekitar 1-6,4 m di atas permukaan laut. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° - 32° Celcius.

Tabel 4.1 : Luas daerah menurut kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2017

No	Kecamatan	Luas (Km)	Persentase (%)
1	Tebing Tinggi Barat	587.33	15.84
2	Tebing Tinggi	81.00	2.18
3	Tebing Tinggi Timur	768.00	20.71
4	Rangsang	411.12	11.08
5	Rangsang Presisir	371.14	10.00
6	Rangsang Barat	130.90	3.53
7	Merbau	435.71	11.75
8	Pulau Merbau	380.40	10.26
9	Tasik Putri Puyu	542.24	14.62
Kepulauan meranti		3,707.84	100

Sumber : BPS Kepulauan Meranti, 2018



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kecamatan yang memiliki luas yang paling besar adalah kecamatan Tebing Tinggi Timur dengan luas 768.00 Km dengan Persentase sebesar 20.71%, dan kecamatan yang memiliki luas yang paling kecil adalah kecamatan Tebing Tinggi yang memiliki luas sebesar 81.00 Km dengan Persentase sebesar 2.18%.

Gugusan daerah kepulauan ini terdapat beberapa pulau besar seperti pulau Tebing tinggi (1.438,83 km<sup>2</sup>), pulau Rangsang (922,10 km<sup>2</sup>), pulau Padang dan Merbau (1.348,91 km<sup>2</sup>). Pada umumnya struktur tanah di Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri atas tanah organosol (Histosol), yaitu tanah gambut yang banyak mengandung bahan organik. Tanah ini dominan diwilayah Kabupaten Kepulauan Meranti terutama daratan rendah diantara aliran sungai. Sedangkan disepanjang aliran sungai umumnya terdapat formasi tanggul alam natural river levees yang terdiri dari tanah-tanah Alluvial (Entisol).

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten yang baru dimekarkan lima tahun silam, banyak terjadi perkembangan diberbagai aspek, baik itu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pembangunan, maka dari itu masyarakat saling bekerjasama untuk pembangunan di kabupaten kepulauan meranti. Salah satunya selerasinya masyarakat beragama yang selaras didalam perkembangan kabupaten kepulauan meranti. Dimana terdapat tujuh kepercayaan agama yang dianut oleh masyarakat di kabupaten kepulauan meranti. Yaitu Islam 160,585 Jiwa, Kristen 12,370 Jiwa, Katolik 168 Jiwa, Budha 23,961 Jiwa, Konguchu 1,374 Jiwa, dan Hindu 75 Jiwa, serta sarana ibadah yang ada di kabupaten kepulauan meranti yaitu Masjid 243 buah, Mushalla 300 buah, Gereja

15 buah, dan Vihara 37 buah. Bukan hanya agama yang beragam tetapi, terdapat banyak etnis di kabupaten kepulauan meranti tersebut, diantaranya Melayu, Minangkabau, Bugis, Batak, Jawa dan Tionghoa. Sebagai Kabupaten kepulauan Meranti.

Kabupaten Kepulauan meranti mempunyai banyak potensi sumber daya alam, yang menjadi penopang kehidupan masyarakat disana dimana masyarakat disana berkerja sebagai bertani, pelaut, nelayan dan berdagang. Secara geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi perairan laut dan perairan umum yang cukup luas serta daratan yang dapat dikembangkan usaha budidaya perikanan, berpeluang bagi investor untuk menanamkan investasi baik dibidang penangkapan di perairan lepas pantai dan budidaya perikanan (tambak, keramba dan kolam).

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi sumber daya alam, baik sektor Migas maupun Non Migas, di sektor Migas berupa minyak bumidan gas alam, yang terdapat di daerah kawasan pulau Padang. Di kawasan ini telah beroperasi PT Kondur Petroleum S.A di daerah Kurau desa Lukit (Kecamatan Merbau), yang mampu produksi 8500 barel/hari. Selain minyak bumi, juga ada gas bumi sebesar 12 MMSCFD (juta kubik kaki per hari) yang direncanakan penggunaannya dimulai 2011–2020.

Di sektor Non Migas kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi beberapa jenis perkebunan seperti sagu (*Metroxylon sp*) dengan produksi 440.309 ton/tahun (2012), kelapa: 50.594,4 ton/tahun, karet: 17.470 ton/tahun, pinang: 1.720,4 ton/tahun, kopi: 1.685,25 ton/tahun. Hingga kini potensi perkebunan

hanya diperdagangkan dalam bentuk bahan baku keluar daerah Riau dan belum dimaksimalkan menjadi industri hilir, sehingga belum membawa nilai tambah yang mendampak luas bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Sementara di sektor kelautan dan perikanan dengan hasil tangkapan: 2.206,8 ton/tahun.

#### 4.2 Kependudukan di Kabupaten Kepulauan Meranti

Penduduk adalah sekelompok orang yang tinggal atau menempati suatu wilayah tertentu. Sumber utama kependudukan adalah sensus penduduk, yang tentunya akan mempengaruhi bagaimana kondisi Kabupaten Kepulauan Meranti baik itu ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.

Tabel 4.2 : Tabel Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tebing Tinggi Barat	8.387	7.529	15.916
2	Tebing Tinggi	28.800	27.740	56.540
3	Tebing Tinggi Timur	6.193	5.618	11.811
4	Rangsang	9.694	8.953	18.647
5	Rangsang Presisir	8.766	8.309	17.075
6	Rangsang Barat	8.779	8.771	17.550
7	Merbau	7.416	6.484	14.264
8	Pulau Merbau	7.603	7.465	15.068
9	Tasik Putri Puyu	8.323	8.103	16.426

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017

Jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi dengan jumlah penduduk 56.540 jiwa, laki-laki sebanyak 28.800 jiwa dan perempuan sebanyak 27.740 jiwa. Dan jumlah penduduk terkecil di Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat di Kecamatan

Tebing Tinggi Timur dengan jumlah 11.811 jiwa, laki-laki sebanyak 6.193 jiwa dan perempuan sebanyak 5.618 jiwa.

#### 4.3 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan Kabupaten termuda di wilayah Provinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran terakhir dari Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009. Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Bupati.

Tabel 4.3 : Data Jumlah Kecamatan, Ibu Kota, Desa/ Kelurahan di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017

No	Kecamatan	Ibu Kota	Desa	Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Tebing Tinggi	Selat Panjang	5	4	9
2	Tebing Tinggi Barat	Alai	14	-	14
3	Rangsang	Tanjung Samak	14	-	14
4	Rangsang Barat	Bantar	12	-	12
5	Merbau	Teluk Belitung	9	1	10
6	Pulau Merbau	Renak Rungun	11	-	11
7	Tebing Tinggi Timur	Sungai Tohor	10	-	10
8	Tasik Putri Puyu	Bandul	10	-	10
9	Rangsang Pesisir	Sonde	12	-	12
Kepulauan Meranti			96	5	101

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Meranti (2018)

Dari tabel diatas jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 9 kecamatan yang terdiri dari 101 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Rangsang dan

Tebing Tinggi Barat sebanyak 14 desa/kelurahan dan Kecamatan yang memiliki jumlah desa/kabupaten terendah terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi sebanyak 9 desa/kelurahan.

#### 4.4 Mata Pencarian Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti

Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 265,706 Jiwa dimana terdapat berbagai macam suku, agama dan mata pencarian yang berbeda. Sebagai Kabupaten Kepulauan, Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai banyak potensi sumber daya alam yang menjadi penopang bagi hidup masyarakat, dimana sebagian besar bekerja sebagai petani, berkebun, bertenak, perikanan dan berdagang, itu semua tidak terlepas dari potensi yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Untuk pertanian sendiri Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki luas tanaman padi yaitu 2,523 ha; Jagung 123 ha; ketela rambat 51 ha; ketela pohon 98 ha; dan kacang tanah 10; demikian pula dibidang berkebunan , untuk area tanaman perkebunan yang dimiliki penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu 29,920 ha; untuk perkebunan kelapa, 15,883 ha; untuk luas area perkebunan karet, sagu 32,022 ha; kopi 1,130 ha; dan perkebunan pinang 480 ha; dimana jumlah produksi perkebunan milik penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti semakin lama semakin meningkat.

Serta untuk dibidang perternakan, perikanan dan berdagang penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki hasil yang cukup produktif dimana untuk di perternakan sendiri memiliki hasil 6,083 ekor untuk kambing, 4,208 ekor sapi, 44,035 ekor ayam beras, dan 8,731 ekor itik, hal serupa terjadi di bidang

perikanan dimana tercatat 27,85 kolam yang dimiliki penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti dan untuk di sektor perdagangan sendiri masyarakat disana cukup banyak, hal ini terlihat dari jumlah pasar tradisional dan tempat usaha dengan 1,018 kios yang dimiliki untuk berdagang/usaha bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Tingkat Pengangguran di Kabupaten Kepulauan Meranti

Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Kepulauan Meranti. Data yang digunakan dalam menganalisis yaitu mulai dari tahun 2010-2017. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Eviews 9. Maka dari itu perlu dilihat perkembangan secara umum PDRB dan UMK terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tingkat pengangguran merupakan masalah utama yang dihadapi sehingga belum bisa dipecahkan hingga saat ini. Masalah pengangguran ini juga terjadi di semua Provinsi dan di semua Kabupaten termasuk di Kabupaten Kepulauan Meranti ini. Tingkat pengangguran di Kabupaten Kepulauan Meranti ini termasuk salah satu tingkat pengangguran tinggi diantara tingkat pengangguran di kabupaten lainnya.

Salah satu yang mempengaruhi pengangguran di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Hal tersebut dikatakan PDRB merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. PDRB adalah nilai bersih yang

dihasilkan dari berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat disuatu wilayah tersebut dalam periode tertentu (Hadi Sasana, 2006). Jika semakin tinggi PDRB di suatu daerah tersebut, maka semakin pula potensi sumber penerimaan di daerah tersebut.

Sedangkan UMK didalam system Ricardo, tingkat upah meningkat apabila harga barang yang dibutuhkan oleh buruh buruh tersebut meningkat. barang yang dihasilkan sebagian besar adalah hasil dari pertanian. Karena itu untuk menghasikan satu unit produk dibutuhkan buruh lebih banyak sehingga apabila permintaan terhadap buruh mulai meningkat maka akan menaikkan upah (Jhingan, 2012). Perbandingan dengan meranti, disana jugak merupakan sebagian besar penghasi sagu terbesar dari sector pertanian. Akan tetapi sebagian pengelola sagu tersebut lebih cendrung dikelola oleh keluarga nya sendiri dengan alat yang digunakan pun menggunakan alat rancangan sendiri di bandingkan alat modrn yang ada. Oleh karena itulah pengelolaan sagu tersebut lebih memilih dikelola oleh keluarga nya sendiri dibandingkan membutuhkan kan tenaga buruh lain dari luar yang lebih banyak lagi.

Tingkat pengangguran merupakan isu penting dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Ada beberapa indikator ekonomi yang dapat mempengaruhi besarnya tingkat pengangguran diantara nya adalah Produk Domestik Regional Bruto (BDRB) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Pembahasan dalam penelitian ini akan membahas pada tenaga kerja yang belum memperoleh pekerjaan. Sebelum dibahas mengenai pengangguran secara



terinci, Dari penelitian ini memberikan gambaran menyangkut Tingkat Pengangguran Terbuka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Setiap tahun pasti ada sisa pencari kerja yang tidak memperoleh pekerjaan dan menimbulkan jumlah pengangguran di Indonesia bertambah (Rosidi,2012) Berikut jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kepulauan Meranti dari tahun 2010-2017 pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.1.1 : Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2010-2017 (%).

No	Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
1	2010	6.70
2	2011	8.59
3	2012	8.63
4	2013	6.99
5	2014	11.76
6	2015	9.37
7	2016	7.46
8	2017	4.54

Sumber: Badan Pusat Statistik Riau 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kepulauan Meranti dari tahun 2010-2017 mengalami fluktuasi. Adapun tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 11.76%. sedangkan tingkat pengangguran terbuka terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 4.54%.

## 5.2 Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Kepulauan Meranti

Produk domestik regional bruto meranti mengangarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun pdrb meranti yang dilakukan dengan 2 pendekatan yaitu, produk dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) yang dilakukan oleh masyarakat meranti. Berikut jumlah produk domestik regional bruto dan persentase di kabupaten kepulauan meranti pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.1.2 : Produk Domestik Regional Bruto, Pertambahan dan Pertumbuhan di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2010-2017

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)	Pertambahan	Pertumbuhan (%)
2010	8.690.278,58	-	-
2011	10.275.755,70	1.585.477,12	18,24
2012	11.840.437,48	1.564.681,78	15,23
2013	13.100.964,46	1.260.526,98	10,65
2014	15.127.124,09	2.026.159,63	15,47
2015	15.150.690,73	23.566,64	16
2016	16.046.158,33	895.467,60	5,91
2017	16.731.422,70	685.264,37	4,27

Sumber: Badan Pusat Statistik Riau, Tahun 2017 dan Data Olahan 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 16.731.422,7 Juta Rupiah dengan Pertambahan 685.264,37 orang dan pertumbuhan 4,27%. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terendah terlihat pada tahun 2010 sebesar 8.690.278,58 Juta Rupiah, dengan Pertambahan terendah pada tahun 2015 yaitu sebanyak 23.566,64 Orang dan Pertumbuhan Terendah dilihat pada tahun 2015 yaitu sebesar 16%.

### 5.3 Upah Minimum Kabupaten di Kabupaten Kepulauan Meranti

Upah Minimum Kabupaten meranti setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan meskipun UMK selalu berubah yang ditetapkan setiap tahunnya, namun masih bersifat seremonial belaka. Karena masih banyak tenaga kerja yang mendapatkan upah jauh dibawah yang ditetapkan, sama seperti dengan tahun-tahun sebelumnya.

UMK juga dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat upah minimum kabupaten di meranti semakin rendah tingkat pengangguran terbuka di meranti begitu pula sebaliknya, jika semakin tinggi tingkat pengangguran di kabupaten kepulauan meranti tersebut. Berikut jumlah upah minimum kabupaten dan persentase di kabupaten kepulauan meranti:

Tabel 5.1.3 : Upah Minimum Kabupaten, Pertambahan dan Pertumbuhan di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2010-2017

Tahun	UMK (Rupiah)	Pertambahan	Pertumbuhan (%)
2010	1.016.000	-	-
2011	1.125.000	109.000	9,69
2012	1.255.000	130.000	10,3
2013	1.510.000	255.000	16,8
2014	1.736.685	226.685	13,0
2015	1.940.000	203.315	10,48
2016	2.163.100	223.100	10,31
2017	2.341.556	178.456	7,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Riau, Tahun 2017 dan Data Olahan 2019

Dari tabel diatas dinyatakan bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017 mengalami Tahun tertinggi yaitu sebesar 2.341.556 Rupiah dengan Pertambahan 178.456 Orang dan Pertumbuhan 7,62%. sedangkan Upah Minimum Kabupaten pada Tahun 2010 yang terendah sebesar 1.016.000 Rupiah, dengan Pertambahan 130.000 Orang di tahun 2012 dan Pertumbuhan 7,62% pada tahun 2017.

#### 5.4 Interpretasi Hasil

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari data yang di olah yang menggunakan alat Eviews 9 diketahui bahwa pengaruh produk domestic regional

bruto ( $x_1$ ) dan upah minimum kabupaten ( $x_2$ ) di kabupaten kepulauan meranti.

Setelah dilakukan pengolahan maka diketahui persamaan sebagai berikut:

Dependent Variable: TINGKAT\_PENGANGGURAN\_TERBUKA  
(Y)

Method: Least Squares

Date: 08/05/19 Time: 10:04

Sample: 2010 2017

Included observations: 8

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PDRB (X1)	2.13E-06	8.05E-07	2.641242	0.0459
UMK (X2)	-0.013032	0.004749	-2.744072	0.0406
C	0.888647	3.868781	0.229697	0.8274
R-squared	0.601002	Mean dependent var		8.005000
Adjusted R-squared	0.441402	S.D. dependent var		2.129138
S.E. of regression	1.591305	Akaike info criterion		4.046982
Sum squared resid	12.66126	Schwarz criterion		4.076773
Log likelihood	-13.18793	Hannan-Quinn criter.		3.846057
F-statistic	3.765690	Durbin-Watson stat		1.601519
Prob(F-statistic)	0.100561			

$$Y = 0,888647 + 0,00000213 X_1 - 0,013032 X_2 + e$$

Dari persamaan diatas, maka dapat diketahui pengaruh kedua faktor yang mempengaruhi Pengangguran di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari kedua faktor yang mempengaruhi  $X_1$  produk domestik regional bruto terhadap tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran di kabupaten kepulauan meranti. Sedangkan  $X_2$  upah minimum kabupaten berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di kabupaten kepulauan meranti.

#### 5.4.1 Koefisien Regresi

Berikut ini hasil persamaan diatas yaitu Produk Domestik Regional Bruto ( $X_1$ ) dan Upah Minimum Kabupaten ( $X_2$ ), terhadap tingkat pengangguran ( $Y$ ) di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan analisis regresi sebagai berikut :

- a. Konstanta  $b_0$  : 0,888647 artinya besarnya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kepulauan Meranti jika produk domestik regional Bruto dan upah minimum kabupaten sama dengan 0 adalah 0,888647 %.
- b. Nilai Koefisien  $b_1$  : 0,00000213 dan berdasarkan uji T (Parsial) berarti variabel produk domestik regional bruto ( $x_1$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran ( $y$ ) di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pengaruh tersebut artinya jika terjadi penambahan pdrb 1% pertahun. maka akan meningkat pengangguran di kabupaten kepulauan meranti.
- c. Nilai Koefisien  $b_2$  : -0,013032 dan berdasarkan uji T (Parsial) berarti variabel upah minimum kabupaten ( $x_2$ ) berpengaruh negative namun

signifikan terhadap tingkat pengangguran ( $y$ ) di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pengaruh tersebut artinya jika terjadi kenaikan upah minimum 1% pertahun. Maka tingkat pengangguran di Kabupaten Kepulauan Meranti turun sebesar 0,013032 %.

#### 5.4.2 Uji Statistik

##### a. Koefesien Determinasi Berganda ( $R^2$ )

Koefesien determinasi berganda atau ( $R^2$ ) berfungsi untuk menyelidiki seberapa besar variabel bebas (produk domestik regional bruto dan upah minimum kabupaten dapat menerangkan variasi variabel terikat tingkat pengangguran) atau untuk mengatur kebaikan suatu model.

Berdasarkan dari hasil olahan dapat dilihat bahwa nilai  $R^2$  Adalah 0,601002 hal ini menunjukkan bahwa sebesar 60% variabel-variabel bebas (produk domestik regional bruto dan upah minimum kabupaten) sudah mewakili untuk menjelaskan variabel tidak bebas (tingkat pengangguran). Sedangkan sisanya dari 40% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

##### b. Uji T (Parsial)

Uji T bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu independent variabel individu dalam menjelaskan variabel dependent. Uji ini dilakukan dengan membandingkan antara T sig dengan  $\alpha$  0,05. Dengan kriteria sebagai berikut yaitu:

Jika  $T \text{ Prob} < \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak

Jika  $T \text{ Prob} > \alpha = 0,5$  maka  $H_0$  diterima

1. Pengujian Produk Domestik Regional Bruto ( $X_1$ ) terhadap Tingkat Pengangguran (Y)

Berdasarkan hasil uji T (Parsial), maka dapat dilihat dari nilai probabilitas Produk Domestik Regional Bruto ( $X_1$ ) adalah ( $0.0459 < 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak. Hal tersebut berarti secara parsial Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Pengujian pengaruh Upah Minimum Kabupaten ( $X_2$ ) terhadap Tingkat Pengangguran (Y)

Berdasarkan hasil uji T (Parsial), maka dapat dilihat dari nilai probabilitas Upah Minimum Kabupaten ( $X_2$ ) adalah ( $0.0406 < 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak. Hal tersebut berarti secara parsial upah minimum kabupaten berpengaruh negative tetapi signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Kepulauan Meranti.

- c. Uji F (Simultan)

Uji F (Simultan) merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel terikat.

Jika  $F \text{ Prob} < \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak

Jika  $T \text{ Prob} > \alpha = 0,5$  maka  $H_0$  diterima

Dari hasil uji F (Simultan) dapat diketahui bahwa uji F Prob sebesar  $0.100561 > \alpha 0,05$  maka  $H_0$  diterima. Hal tersebut berarti bahwa variabel produk



domestik regional bruto dan upah minimum kabupaten secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### 5.4.3 Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam model regresi, variabel bebas dan variabel tidak bebas atau keduanya telah berkontribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah telah memiliki distribusi data normal atau mendekati data normal. Untuk mengetahui apakah model regresi tersebut normal atau tidak, bisa dilihat dari grafik histogram residual yang pada umumnya berbentuk lonceng jika mempunyai distribusi normal dan juga melakukan uji Jarque-Bera. Berikut grafik normalitas :

Dari hasil estimasi regresi, terlihat bahwa histogram residual model regresi tersebut tidak berbentuk lonceng maka kedua variabel tersebut mempunyai distribusi yang tidak normal. Sedangkan jika dilihat menggunakan uji Jarque-Bera diketahui bahwa nilai JB adalah 0,820146 dan nilai Chi Square adalah 11.070498 Nilai JB lebih kecil dari Chi Square yang model regresi tersebut mempunyai distribusi yang tidak normal.

##### 2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independent. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi diantara variabel bebas.

Pengujian ini dilakukan dengan memperhatikan nilai VIF dengan ketentuan jika nilai  $VIF < 10$  maka model tidak ditemukan model adanya multikolinieritas, dan jika nilai  $VIF > 10$  maka model ditemukan adanya adanya multikolinieritas. Berikut grafik uji multikolinieritas :

Variance Inflation Factors

Date: 08/05/19 Time: 11:09

Sample: 2010 2017

Included observations: 8

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
PRODUK_DOMESTIK_REGIONAL (X1)	6.48E-13	381.1673	15.00499
UPAH_MINIMUM_KABUPATEN (X2)	2.26E-05	205.6878	15.00499
C	14.96747	47.28588	NA

Berdasarkan hasil pengolahan Dari hasil penelitian diatas, diketahui bahwa Produk Domestik Reginal Bruto (X1) menunjukkan hasil positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran di kabupaten kepulauan meranti. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi produk domestik regional bruto di suatu wilayah maka semakin tinggi pula tingkat pengangguran terbuka dan sebaliknya

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas ini untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara mendeteksi apakah model regresi tersebut terjadi heteroskedastisitas atau tidak, bisa dilihat dari nilai *Chi Square* (Obs\*R-Squared) dan nilai kritis *Chi Square* dengan ketentuan jika nilai *Chi Square* lebih kecil dari nilai kritis maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan jika *Chi Square* lebih besar dari nilai kritis maka terjadi heteroskedastisitas. Berikut grafik uji heteroskedastisitas :

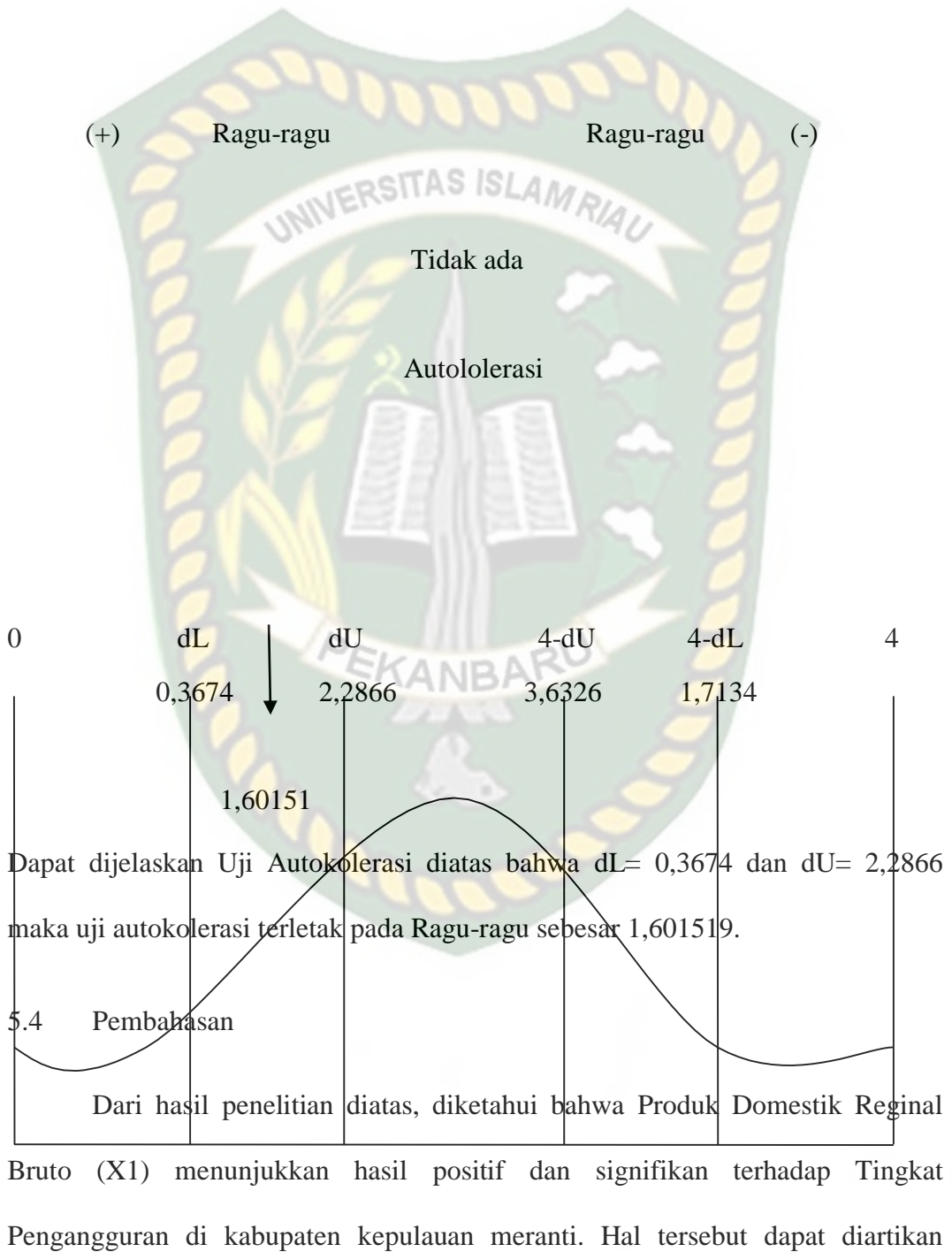
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.793649	Prob. F(2,5)	0.5019
Obs*R-squared	1.927707	Prob. Chi-Square(2)	0.3814
Scaled explained SS	0.250613	Prob. Chi-Square(2)	0.8822

Berdasarkan dari hasil pengolahan data diatas, maka dapat diketahui nilai Obs\*R-Square adalah 1,927707 sedangkan nilai kritis Chi-Square adalah sebesar 11,070498 maka dapat dilihat nilai Obs\*R-Square lebih kecil dari nilai kritis yang artinya model regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 4.Uji Autokolerasi

Pengujian ini bertujuan mengetahui angka dalam satu model regresi linear ada kolerasi atau tidak ada kolerasi Antara variabel gangguan dengan variabel gangguan lain. Pengujian autokolerasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Wastons. Berikut gambaran uji autokolerasi:



bahwa semakin tinggi produk domestik regional bruto di suatu wilayah maka semakin tinggi pula tingkat pengangguran terbuka dan sebaliknya.

Hasil tersebut menyatakan walaupun PDRB dari tahun ketahun terus meningkat tetapi peluang kesempatan kerja cenderung sedikit. Adapun sektor yang dominan di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah pada sektor Pertanian. Dimana sebagian besar kepemilikan lahan pertanian dikuasai oleh masyarakat itu sendiri, yang mana dalam hal pengelolaannya tidak terlalu memerlukan banyak tenaga kerja dikarenakan sebagian besar masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti lebih banyak memilih mengelola lahan pertaniannya sendiri.

Hal ini berkaitan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan, berdasarkan hasil estimasi data panel menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada  $\alpha = 0,05$  tahun 2007-2015. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi produk domestik regional bruto di suatu wilayah maka semakin tinggi pula tingkat pengangguran terbuka dan sebaliknya. Oleh karena itu,hipotesis kedua yang berbunyi “Variabel PDRB berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di karesidenan Pati tahun 2007-2015” didukung.

Sedangkan hasil Upah Minimum Kabupaten (X2) menunjukkan hasil negative namun signifikan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat upah minimum kabupaten disuatu wilayah maka semakin rendah tingkat pengangguran terbuka, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah upah minimum

kabupaten di suatu wilayah maka semakin tinggi pula tingkat pengangguran terbuka.

Signifikansi tersebut disebabkan kenaikan UMK yang terjadi di kabupaten kepulauan meranti masih berada dibawah titik keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja, sehingga tidak terjadi kekakuan upah. Kenaikan UMK tersebut lebih mendorong tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan dan begitu juga bagi sektor usaha, kenaikan UMK tidak disikapi oleh manajemen perusahaan untuk mengurangi jumlah pekerja tetapi dijadikan sebagai strategi penting dalam meningkatkan kinerja pekerja secara nyata, mendorong terpeliharanya kelang-sungan hidup satuan kerja, terwujudnya visi dan misi dan untuk pencapaian sasaran kerja melalui produktivitas yang tinggi yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat pengangguran yang ada.

Kaitan upah yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran dijelaskan oleh Kaufman dan Hotckiss (1999). Yang menjelaskan bahwa upah merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran, karena tingkat upah yang dilakukan pemerintah pada suatu negara akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat penagngguran yang ada, semakin tinggi besaran upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut. Sehingga semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan maka akan membawa pengaruh pada tingginya tingkat pengangguran yang terjadi (Kaufman dan Hotckiss, 1999). Hal ini bisa terjadi karena semakin tinggi upah yang ditetapkan maka akan berpengaruh pada peningkatan biaya output yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Akibat

nya suatu perusahaan akan melakukan efisiensi terhadap produksinya dengan cara mengurangi jumlah tenaganya.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Upah Minimum Kabupaten Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2010-2017 maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil olahan dapat dilihat bahwa  $R^2$  sebesar 0.601002 hal ini menunjukkan bahwa sebesar 60% variabel-variabel bebas (Produk Domestik Regional Bruto dan Upah Minimum Kabupaten) sudah mewakili untuk menjelaskan variabel tidak bebas (Tingkat Pengangguran). Sedangkan sisanya dari 40% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.
2. Dan berdasarkan uji F (simultan) diketahui bahwa nilai F prob sebesar  $0.100561 > \alpha 0,05$  maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak. Oleh karena itu variabel produk domestik regional bruto dan upah minimum kabupaten secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### 6.2 Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian diatas, maka penulis mencoba untuk memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.



1. Bagi pemerintah untuk meningkatkan Tingkat Angkatan Kerja di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemerintah atau pengusaha harus menyatakan program latihan kerja agar tenaga kerja lebih bermutu dan siap pakai dalam menjalani suatu pekerjaan yang tersediakan, serta mampu mengembangkan kompetensi kerja tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan.
2. Pemerintah hendaknya meningkatkan mutu pendidikan dan fasilitas pelatihan guna meningkatkan kemampuan pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.
3. Pemerintah wajib terus mendorong masuknya investasi baik dari dalam maupun dari luar negeri guna menciptakan lapangan pekerjaan.
4. Bagi warga negara harus ikut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan dan usaha pemerintah yang sudah di programkan guna mengurangi pengangguran di Kabupaten Kepulauan Meranti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Widarjono. 2013. *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya*. Ekonosia. Jakarta.
- Alwi.2002.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Anonim, 2007. Sugarcane. Diakses dari : <http://en.wikipedia.org/wiki/sugarcane>. Tanggal 17 April 2011.
- Arsyad. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*.BPFE. Yogyakarta.
- Arsyad, Lincolin. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Penerbit STIE YKPN.Yogyakarta.
- Asyhadie, Zaeni. 2007.*Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan BidangHubungan Kerja*. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Boediono, 1995. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta:BPFE.
- Boediono. 2000. *Ekonomi Moneter*. Edisi Ketiga. BPFE. Yogyakarta.
- Hadi, Priyo Hari. 2006. *Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Se Jawa-Bali)*". Simposium Nasional Akuntansi IX Padang.
- Jhingan, M. L."*Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*". PT Rajagrafindo Persada. Jakarta, 2012.
- J.Supranto, 2003, "*Mentode Penelitian Hukum dan Statistik*",Jakarta: Rineka Cipta
- Kaufman, Bruce E dan Julie L Hotchkiss. 1999. *The Economic of Labor Markets Fifth Edition*. Georgia : The Dryden Press.
- Mankiw, N. Gregory, 2000. *Teori Makro Ekonomi*. Edisi Keempat. Erlangga. Jakarta

Mankiw, N. Gregory. “*Makroekonomi, Edisi Keenam*”. Erlangga. Jakarta, 2006.

Rosyidi. 2009. *Mikroekonomi. Teori Permintaan*. Penerbit Erlangga. Jakarta

Sukirno, Sadorno. 2002. *Pengantar Teori Makroekonomika*. Edisi 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sukirno, Sadono. “*Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan Edisi Kedua*”. Kencana Prenada Media. Jakarta. 2006.

Sukirno, Sadono. 2010. *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Edisi 3. Jakarta: Rajawali Pers.

Todaro, Michael P., 1998, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi Keenam, Jakarta: Erlangga.

Todaro, Michael P.dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi* (edisesembilan, jilid I). Jakarta : Erlangga

